

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Suatu pemerintahan dikatakan baik apabila informasi yang diberikan kepada publik tentang perencanaan dan pelaksanaan yang akan dicapai serta disajikan secara transparansi dan akuntabilitas. Mengelola pemerintahan yang baik serta bertanggung jawab, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah penting memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan yang bertanggung jawab adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Salah satu lembaga pemerintah yang wajib dalam membuat laporan keuangan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap SKPD wajib menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada SKPD terkait dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Nirwana & Haliah (2018) menyatakan demi mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, instansi wajib menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan berkualitas.

Rossieta *et al.*, (2018) berpendapat bahwa laporan keuangan yang berkualitas merupakan bentuk dari akuntabilitas pengelolaan keuangan serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunaanya dalam pengambilan

keputusan. Kaawaase *et al.*, (2021) menyakan tujuan pelaporan keuangan sebagai sarana untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan dan kualitas laporan keuangan sangat membantu membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya dalam instansi. Bentuk sarana pertanggungjawaban dalam pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Colin & Anastasios (2016) menyatakan bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan bentuk dari transparansi dan juga membantu tata kelola pemerintahan.

Informasi keuangan dapat berguna bagi para penggunanya, sehingga instansi diwajibkan menyusun laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan aturan yang ada. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas harus memenuhi karakteristik : Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Lim, J *et al.*, (2015) mengisyaratkan bahwa informasi yang berkualitas dalam laporan keuangan akan mengurangi ketidakpastian terhadap informasi mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh instansi.

Tingkatan relevansi serta keandalan sebuah laporan keuangan sangat erat kaitannya dan dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan objektivitas seorang auditor dalam bekerja, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya, serta penerapan *good corporate*

governance demi mewujudkan kinerja instansi yang memuaskan berupa sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Faktor pertama yang penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan adanya auditor yang memiliki tingkat objektivitas tinggi, tidak terpengaruh, dan tidak memihak pada siapapun serta jujur dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh instansi. Endaya & Hanefah (2016) menyatakan bahwa objektivitas merupakan elemen penting bagi auditor, dengan adanya objektivitas maka akan memungkinkan kinerja auditor menjadi lebih akurat. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2016) menyatakan setiap auditor dalam melaksanakan tugasnya harus tetap mempertahankan integritas, objektivitas, dan independensinya agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain. Auditor yang objektif akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan penilaian dan pengetahuan yang dimilikinya tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2020) prinsip objektivitas mengharuskan setiap auditor untuk tidak mengkompromikan pertimbangan profesional karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh tidak semestinya dari pihak lain.

Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia, dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk memahami aturan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Wan (2019) berpendapat bahwa saat instansi bergerak atau berjalan, pengembangan sumber daya manusia yang efektif sangat dibutuhkan untuk

meningkatkan dan mensukseskan instansi secara menyeluruh. Selama pengembangan sumber daya manusia, instansi perlu mendukung sumber daya manusianya dengan cara melakukan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensinya. Tejedo & Araujo (2020) menyatakan sumber daya manusia sebagai salah satu aset utama yang dimiliki instansi dalam mendorong peningkatan nilai instansi dan mengarah pada keunggulan kompetitif pengetahuan ekonomi. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki individu dalam pelaksanaan kerjanya berupa keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dapat membantu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan instansi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nirwana & Haliah (2018) menyatakan bahwa tanpa kompetensi akan sulit bagi instansi untuk menciptakan atau menghasilkan kinerja yang unggul dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Penerapan *Good Corporate Governanve* (GCG) menjadi salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam memastikan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam instansi secara transparansi. Kachouri & Jarbou (2016) menyatakan bahwa transparansi informasi keuangan merupakan bahan mendasar dari praktik tata kelola yang baik serta pentingnya tata kelola dalam instansi dapat meningkatkan pengungkapan informasi yang andal dan relevan bagi para pengguna laporan keuangan dengan dibarenginya ketepatan waktu dalam menyajikan suatu informasi. Mohammed *et al.*, (2017) berpendapat bahwa *good corporate governance* berkaitan dengan pelaporan keuangan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan dan kemudahan pemangku kepentingan dalam menggunakan laporan keuangan.

Alzeban (2019) mengisyaratkan bahwa wajib bagi instansi untuk mematuhi peraturan mengenai tata kelola, sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi. Rusdiyanto *et al.*, (2019) menyatakan pelaksanaan *good corporate governance* sudah sampai tahap dimana adanya tuntutan untuk menyampaikan kepada publik tentang apa saja yang telah dilakukan instansi dalam mencapai tujuannya dan menjamin telah diselenggarakannya tata kelola tersebut. GCG dalam instansi dapat dilihat dari segi mekanisme internal maupun mekanisme eksternal. Mekanisme internal akan lebih fokus kepada bagaimana pimpinan dalam menjalankan instansi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana hubungan instansi dengan pihak eksternal seperti masyarakat berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan tujuan dari instansi sendiri. Kaawaase *et al.*, (2021) berpendapat bahwa tanpa GCG keseluruhan manajemen, pengambilan keputusan dan pelaporan mungkin tidak dapat dicapai secara realistis. GCG juga harus memastikan lingkungan kegiatan bisnis yang dilakukan adil dan transparan, serta instansi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.

Demi meningkatkan kualitas laporan keuangan sangat dibutuhkan objektivitas auditor, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan *good corporate governance*.

1.2 Fenomena Penelitian

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Agung Firman Sampurna, menyebutkan bahwa berdasarkan tingkat pemerintahan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dicapai oleh seluruh laporan keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Opini WTP juga dicapai oleh 364 dari 415 Pemerintah Kabupaten, dan 87 dari 93 Pemerintah Kota. BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2019, dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendapatkan opini WTP. DKI Jakarta telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan predikat WTP selama tiga kali berturut-turut sejak tahun 2017.

Kendati demikian, BPK turut memberikan lima catatan kepada Pemprov DKI Jakarta, antara lain Pemprov DKI Jakarta belum menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2018-2019 di pulau Maju. Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar, menyatakan bahwa pengadaan tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pendapatan diterima di muka hasil lelang titik reklame, pengelolaan piutang kompensasi koefisien lantai bangunan, serta pengelolaan piutang kompensasi rumah susun murah sederhana di Jakarta belum memadai. BPK masih menemukan beberapa permasalahan secara material meski tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan, tetapi tetap memerlukan perhatian untuk perbaikan permasalahan. Bahrullah berharap catatan dari BPK RI segera mendapatkan jawaban serta dapat ditindaklanjuti oleh jajaran

Pemprov DKI Jakarta dan SKPD setiap Kota Administrasi diminta lebih giat lagi dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan.

1.3 GAP Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alzeban (2019) menunjukkan bahwa objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, sementara penelitian yang dilakukan oleh Neidermeyer *et al.*, (2017) menemukan bahwa ada hubungan negatif antara objektivitas auditor dan peningkatan kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tejedo & Araujo (2020) serta Nirwana & Haliah (2018) menunjukkan kesesuaian dimana kompetensi sumber daya memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, namun bertolak belakang dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Izi *et al.*, (2020) yang menunjukkan hasil kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kaawaase *et al.*, (2021) serta Habib & Jiang (2015) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Arthur *et al.*, (2019) menyatakan bahwa hubungan antara *good corporate governance* dengan peningkatan kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif.

Berdasarkan fenomena dan adanya inkonsisten hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji ulang teori yang menyebutkan bahwa objektivitas

auditor, kompetensi sumber daya manusia, dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Objektivitas Auditor, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Wilayah Jakarta Timur)”**.

1.4 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.4.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi instansi sebagai pertanggung jawaban kepada publik demi mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.
2. Laporan keuangan yang berkualitas menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan.
3. Informasi yang berkualitas dalam laporan keuangan akan mengurangi ketidakpastian terhadap informasi mengenai tujuan yang ingin dicapai.

1.4.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, untuk menghindari pembahasan agar tidak meluas dan spesifik. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Objektivitas Auditor, dalam mengukur objektivitas auditor indikator yang digunakan dalam penelitian yaitu bebas dari konflik kepentingan, pengungkapan kondisi sesuai fakta, bersikap adil, dan tidak memihak.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia, dalam mengukur kompetensi sumber daya manusia indikator yang digunakan yaitu keterampilan (*skills*), pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan kemampuan (*ability*).
3. Penerapan *Good Corporate Governance*, dalam mengukur *good corporate governance* indikator yang digunakan sebagai berikut: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan.
4. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, dalam mengukur kualitas laporan keuangan indikator yang digunakan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

1.4.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah objektivitas auditor berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan?
3. Apakah penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah. Secara rinci, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh objektivitas auditor terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

1.6 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan lebih luas tentang pengaruh objektivitas auditor, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan *good corporate governance* terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, serta memperoleh penjelasan mengenai hasil fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan dengan teori yang ada.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi yang membutuhkan serta dapat menjadi landasan untuk penelitian tentang pengaruh objektivitas auditor, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan *good corporate governance* terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya.

2. Aspek Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk Pemerintah Daerah dalam menerapkan objektivitas auditor, kompetensi sumber daya manusia, dan *good corporate governance* untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dipahami pihak lain tentang pengaruh objektivitas auditor, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan *good corporate governance* terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.